PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI SEKTOR PERTANIAN MELALUI FILANTROPI ISLAM WAKAF

(Studi Kasus Pada Implementasi Global Wakaf ACT, Lumbung Beras Wakaf Desa Jipang Kecamatan Cepu, Blora Jawa Tengah)

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

Hana Dwi Pramesti

165020500111027

JURUSAN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020

LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI SEKTOR PERTANIAN MELALUI FILANTROPI ISLAM WAKAF

(Studi Kasus Pada Implementasi Global Wakaf Act, Lumbung Beras Wakaf Desa Jipang Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah)

Yang disusun oleh :

Nama	:	Hana Dwi Pramesti
NIM	:	165020500111027
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jurusan	:	S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai ***persyaratan ujian skripsi*** yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 9 Januari 2021.

Malang, 9 Januari 2021

Dosen Pembimbing,

Dra. Marlina Ekawaty, M.Si., Ph.D
NIP. 19650311 198903 2 001

Judul : Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sektor Pertanian Melalui Filantropi Islam Wakaf (Studi Kasus pada Implementasi Global Wakaf ACT, Lumbung Beras Wakaf Desa Jipang Kecamatan Cepu, Blora Jawa Tengah)

Hana Dwi Pramesti

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email : hanapramesti3@gmail.com

ABSTRAK

Instrumen wakaf di Indonesia selama ini kurang diperuntukkan pada pemberdayaan ekonomi umat, namun hanya sebatas untuk kepentingan ibadah, pendidikan, dan pemakaman semata. Artinya aset wakaf sebagian besar tidak dikelola secara produktif. Padahal menurut data, jumlah aset wakaf di Indonesia mencapai 590 triliun rupiah. Amat disayangkan jika dengan jumlah tersebut belum mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program pemberdayaan Lumbung Beras Wakaf yang diterapkan pada sektor pertanian melalui filantropi islam wakaf dan menganalisis dampak pada bidang ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya Lumbung Beras Wakaf di Desa Jipang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan, dan triangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua fase dalam pelaksanaan program pemberdayaan Lumbung Beras Wakaf, fase pertama yaitu pendirian LBW Desa Jipang yang terdiri dari lima tahap yakni assessment, business plan, implementasi, recruitment atau pendataan beneficieries, dan monitoring evaluasi. Kemudian fase kedua yaitu proses produksi LBW yang terdiri dari tiga proses diantaranya pra produksi (proses administratif dan transaksi gabah dengan petani), saat produksi (dari pengeringan hingga pengemasan), dan pasca produksi (distribusi kepada penerima manfaat). Sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Jipang setelah adanya LBW adalah penghasilan dan daya beli yang meningkat karena gabah petani dibeli dengan harga terbaik oleh LBW, pola konsumsi masyarakat yang masih cenderung memprioritaskan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan, pendidikan), dan perilaku menabung yang masih menggunakan cara konvensional yaitu melalui kepemilikan aset berupa tanah maupun hewan ternak.

Kata kunci: Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sektor Pertanian, Filantropi Islam Wakaf

---

A. PENDAHULUAN

Salah satu instrumen sektor riil dalam sistem ekonomi Islam adalah wakaf. Instrumen ini sangat potensial untuk dieksplorasi secara maksimal sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian umat. Jika belajar dari sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang begitu penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Namun ironinya, tidak banyak masyarakat saat ini yang memahami bahwa wakaf juga boleh dikelola secara produktif agar kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Sehingga sudah sepatutnya harta wakaf memiliki potensi untuk menjadi sumber dana

pembangunan. Selain sebagai solusi dari kemiskinan, dalam ajaran agama Islam wakaf juga merupakan bagian dari konsep pemberdayaan ekonomi umat.

Apabila dikelola dengan baik, maka wakaf dapat diandalkan untuk pembangunan di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian (Beik, 2017). Karena bila diingat kembali, salah satu sektor yang memberikan kontribusinya dengan menunjukkan tren positif secara konsisten mulai dari tahun 2013 hingga 2018 terhadap PDB Indonesia adalah sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2018, bahwa PDB Pertanian mencapai angka 3,7 persen melebihi target awal yang ditetapkan sebesar 3,5 persen. Indonesia berhasil dijuluki sebagai negara agraris dengan kekayaan sumberdaya alamnya yang melimpah, ditambah jumlah petani di Indonesia menurut BPS pada tahun 2018 mencapai angka 33,50 juta orang. Maka sudah sepantasnya kesejahteraan Indonesia memiliki ketergantungan pada keberhasilan petaninya agar dapat mendukung ketahanan pangan negara.

Tetapi fakta yang terjadi di lapangan begitu mengejutkan. Petani belum bisa dikatakan mencapai kesejahteraan seutuhnya. Karena berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat sekitar 49,41 persen rumah tangga miskin masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya krisis pada petani-petani kita yaitu biaya usaha tani yang masih cenderung tinggi, sistem usaha tani yang bisa dibilang masih terbelakang atau tertinggal, terdapat kerusakan sumber daya alam sehingga semakin berkurangnya lahan pertanian, rendahnya penerapan teknologi budidaya oleh petani, alih fungsi lahan pertanian ke pembangunan infrastuktur, dan kurangnya motivasi dari para petani itu sendiri.

Di tengah terpaan berbagai permasalahan yang menimpa petani-petani Indonesia hari ini, ternyata masih ada beberapa yang berhasil *survive* dengan menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Salah satunya masyarakat yang ada di Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, masyarakat Kabupaten Blora mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan data kependudukan dan ketenagakerjaan, sebagian besar penduduk di desa/kelurahan Kabupaten Blora penghasilan utamanya bersumber pada sektor pertanian yakni sejumlah 247 Desa. Pada khususnya di Kecamatan Cepu, terdapat 11 bidang pertanian yang memiliki potensi untuk dikelola. Dan seluruh lahan pertanian tersebut ditanami padi (BPS, 2018).

Dibalik perkembangan pesat pada sektor pertanian Kabupaten Blora ternyata ada sisi lain yang menarik sehingga berhasil mengundang empati suatu lembaga sosial dan kemanusiaan berstatus swasta yakni Global Wakaf ACT untuk melakukan pemberdayaan di salah satu desa bernama Desa Jipang yang masih menjadi desa bagian dari Kecamatan Cepu Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Saat memasuki masa panen di musim penghujan, petani Desa Jipang mengalami kesulitan untuk menjual gabahnya karena harga jual yang anjlok akibat dipermainkan seenaknya oleh tengkulak dengan dalih tidak ada mesin penggiling (*huller*) yang mau menampung gabah basah mereka. Sehingga dampak yang dirasakan oleh petani dari harga jual gabah yang rendah adalah tidak mampu menutup biaya operasional yang sudah dikeluarkan untuk membeli benih, pupuk, dan lainnya.

Global Wakaf ACT yang cukup masif bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi umat melalui dana wakaf tunai ingin melakukan kerjasama serta berkolaborasi dengan pemerintah desa setempat untuk membantu petani agar bisa keluar dari kedzaliman yang dilakukan oleh para tengkulak sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib mereka. Adapun dana wakaf tunai yang terhimpun, dikelola guna membangun kemandirian ekonomi umat melalui beberapa program pemberdayaan salah satunya berwujud Lumbung Beras Wakaf. Global Wakaf ACT secara resmi meluncurkan program Lumbung Beras Wakaf di Desa

Jipang Kecamatan Cepu Kabupaten Blora Jawa Tengah pada hari Rabu, 4 Desember 2019. Program Lumbung Beras Wakaf ini diwujudkan melalui pembelian gabah milik petani saat panen dengan harga di atas pasaran tengkulak.

Dengan adanya berbagai fakta dan peluang yang didukung dengan data-data seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai "**Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sektor Pertanian Melalui Filantropi Islam Wakaf (Studi Kasus pada Implementasi Global Wakaf ACT, Lumbung Beras Wakaf Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Blora Jawa Tengah)**".

B. KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Zubaedi (2013), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat golongan masyarakat yang sedang dalam kondisi miskin, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan yang bersifat *people-centered, partipatory, empowering, and sustainable*. Konsep pemberdayaan lebih luas dari sekedar upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sekedar mekanisme untuk mencegah proses kemiskinan lebih lanjut.

Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan

Secara filosofis, pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan beragam alternatif humanis untuk pencapaian aspirasi masyarakat (Rustiadi, 2006). Terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi pada suatu kawasan yaitu, (1) membuka kesempatan kerja yang berkualitas bagi penduduk, (2) mencapai situasi perekonomian yang stabil, dan (3) membangun beragam basis ekonomi dan kesempatan kerja (Jamli, 2003). Artinya, desa harus mengenal dengan baik potensi yang dimilikinya, serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam pembangunannya.

Pembangunan Ekonomi dalam Islam

Pembangunan ekonomi berfungsi sebagai satu-satunya cara untuk mewujudkan kemajuan sosial. Ia merupakan faktor yang berdiri sendiri, sedangkan faktor sosial dan lainnya, pengekor bagi faktor independen. Seperti kemiskinan adalah penyebab dari keterbelakangan, maka dengan mencukupi pendapatan yang layak bagi penduduk miskin, akan berdampak secara langsung bagi perubahan kondisi sosial, yang di dalamnya mencakup segi-segi keilmuan, budaya, kesehatan dan lain-lain. Maka yang harus dilakukan adalah mencukupi pendapatan masyarakat, melalui penekanan sisi kebijakan yang terkait dengan peningkatan taraf kehidupan perekonomian masyarakat secara keseluruhan, sesuai sektor-sektor perekonomian yang ditekuni oleh individu- individu warga masyarakat, sehingga akan berpengaruh positif terhadap segala segi kehidupan (Edyson Saifullah, 2016).

Usaha proses pembangunan dalam pengertian Islam, harus menjamin terpenuhinya hak dasar kebutuhan ekonomi bagi setiap individu warga masyarakat; kemudian ketika ada sebagian hak dasar tersebut yang tidak terpenuhi, hal itu mengindikasikan adanya

kemiskinan yang belum tertanggulangi, disebabkan perilaku '*kontraproduktif*' sebagian individu dalam masyarakat, yang tidak melaksanakan fungsi kerjanya. Atau bekerja, tapi menguasai hasil melebihi porsi haknya yang tidak sesuai dengan kadar kontribusinya dalam proses pemakmuran, dengan mengambil hasil dari kontribusi orang lain. Dalam hal demikian telah terjadi masalah dalam faktor distribusi (Edyson Saifullah, 2016).

Peran Swasta dalam Pembangunan Ekonomi

Sektor *private* (swasta) memiliki peran penting dalam pembangunan. Beberapa peran swasta antara lain adalah sebagai: 1) *Development agent*, atau agen pembangunan. Dalam hal ini sektor swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan diberbagai sektor. Swasta juga sebaiknya mampu bergerak di semua sektor yang halal, namun tidak termasuk sektor yang hanya dikuasai oleh sektor publik seperti air, api, dan rumput, 2) *Prime mover of development*, atau penggerak utama dari pembangunan. Pihak swasta mampu menggerakkan pembangunan melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Swasta dapat membantu program pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja, selain yang ditawarkan oleh instansi pemerintah, 3) *Innovator and technological advancement*, di mana sektor swasta diharapkan mampu mendorong berkembangnya inovasi bisnis dan pengembangan teknologi melalui kreativitas. Inovasi dan teknologi ini kemudian diharapkan akan mampu mendorong pembangunan dengan menciptakan output produk yang lebih efektif dan efisien, 4) Partner sektor publik dalam menyediakan jasa dan layanan kepada masyarakat. Swasta juga mampu memberikan jasa layanan kepada masyarakat di samping pelayanan yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Filantropi Islam dan Keadilan Sosial

Secara kebahasaan, *philantrophy* (filantropi) berarti kedermawanan, kemurahhatian, atau sumbangan sosial, sesuatu yang menunjukkan cinta kepada sesama manusia (Echolas dan Shadily, 1995). Filantropi adalah cinta kepada sesama manusia secara umum, berbuat baik kepadanya dengan tulus, dan upaya atau kecenderungan untuk meningkatkan kehidupan kemanusiaan yang baik dan kebahagiaannya seperti lewat kemurahhatian, derma, atau sumbangan (Rachman, 2002). Ada tujuh asumsi yang bisa dibangun untuk menjawab problem filantropi Islam (ZIS dan Wakaf) ketika dihubungkan dengan keadilan sosial diantaranya adalah problem manajemen, problem kultur konsumerisme dan kultur tradisionalisme dalam pengeluaran ZIS dan Wakaf, pemahaman masyarakat yang terbatas, tingkat ekonomi masyarakat kita yang memang lemah, persoalan etos zakat masyarakat menengah ke atas (yang masuk kategori muzakki) yang mungkin masih lemah, persoalan strukutural dan kebijakan makro pemerintah yang tidak berpihak pada kaum miskin, dan problem kalam dan fikih. Problem-problem tersebut menjadi mendesak untuk dicari jalan keluarnya, mengingat saat ini keadilan sosial atau keadilan ekonomi telah menjadi bagian dari HAM yang telah diratifikasi oleh 118 negara pada tahun 1993.

Wakaf Uang

Berdasarkan kategori kebendaanya, wakaf juga bisa dibagi dalam dua bagian yaitu wakaf uang (*cash waqf*) dan non-uang. Secara fikih, akan rawan muncul perbedaan pandangan antara boleh atau tidaknya wakaf uang (*cash waqf*). Sebab itulah, Komisi Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) pada tanggal 11 Mei 2002 telah menetapkan bolehnya wakaf uang, sebagaimana telah disinggung di atas. Argumen yang dijadikan dasar oleh MUI adalah hadits Nabi yang hanya menyebut prinsip bahwa barang wakafnya tidak hilang dan hasilnya disedekahkan. Sebagaimana sebuah ijtihad baru, dibolehkannya wakaf uang adalah sesuatu yang sangat baik bagi kemaslahatan atau pengembangan wakaf di Indonesia. Alasannya karena itu berarti: pertama wakaf tidak memerlukan uang

banyak, wakaf boleh dilakukan dengan uang Rp. 10.000 misalnya. Kedua, wakaf dalam bentuk ini berarti juga bahwa wakaf telah berwujud harta lancar yang penggunaannya fleksibel, sebagaimana telah dijelaskan di muka (Rahardjo, 2002). Ketiga, wakaf bisa dilakukan secara *jama'i* (bersama) sebagai bentuk menyelesaikan masalah ekonomi secara berjama'ah.

Efek Pengganda Wakaf Uang

Efek pengganda ialah sebuah cara untuk menganalisis dan mengukur sejauh manakah pengaruh atau dampak yang diberikan suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Berdasarkan QS. Al Baqarah ayat 261 yang artinya, "*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkannya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui*". Berdasarkan ayat ini, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, termasuk salah satu didalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata memiliki efek pengganda dalam perekonomian.

Hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda dalam ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun juga memiliki dampak ekonomi. Wakaf uang memiliki dampak atau efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung maupun tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh yang signifikan pula pada program pengentasan kemiskinan. Semakin besar jumlah wakaf uang yang berhasil dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian khususnya untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan. Namun yang patut diperhatikan dan dipahami bersama adalah pengaruh ini dapat tercapai apabila seluruh faktor dan pihak yang terlibat mampu bersikap kondusif dalam berjalannya program wakaf uang di Indonesia.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Wakaf uang sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Karena dengan model wakaf ini, daya jangkau mobilisasinya akan jauh lebih merata kepada anggota masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional- konvensional, yaitu dalam bentuk harta fisik yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang relatif mampu. Salah satu model yang dapat dikembangkan dalam mobilisasi wakaf uang adalah model Dana Abadi, yaitu dana yang terhimpun dari berbagai sumber dengan berbagai cara yang sah dan halal. Kemudian dana yang terhimpun dengan volume besar diinvestasikan dengan tingkat keamanan yang tinggi melalui Lembaga Penjamin Syari'ah. (Departemen Agama, 2008: 9) Keamanan investasi ini paling tidak mencakup dua aspek: pertama, keamanan nilai pokok dana abadi, sehingga tidak terjadi penyusutan (adanya jaminan keutuhan). Sedangkan kedua, investasi dana tersebut bisa diproduktifkan dan mampu mendatangkan hasil atau pendapatan (incoming generating allocation). Dari pendapatan inilah pembiayaan kegiatan lembaga akan dilakukan dan sekaligus menjadi sumber untuk pengembangan ekonomi umat. Dengan melalui investasi, wakaf uang bisa diarahkan pada sektor strategis, seperti Sektor Kredit Mikro, Sektor Portofolio Keuangan Syari'ah, dan Sektor Investasi Langsung.

Pendistribusian Harta Wakaf

Dalam fikih, wakaf agaknya bisa disebut sebagai institusi keadilan sosial Islam yang mengandaikan tidak ada atau sangat sedikitnya orang yang dikecualikan dalam

pemanfaatannya, termasuk non-Muslim. Dalam pendistribusian hasil wakaf, sebagian fuqaha mendasarkan pada istihsan (memandang baik suatu tindakan) atau karena alasan maslahat yang dibenarkan oleh hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud bahwa yang dipandang baik oleh kaum Muslimin, maka menurut Allah pun baik. Karena itu, dalam pendistribusian hasil wakaf, seorang nazhir wakaf bisa merujuk pada alasan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Kemaslahatan yang disebut oleh as-Syathibi (730-790 H) sebagai *dharuriyat* (mendesak), baik untuk menjaga agama, nyawa, kebebasan berpikir, reproduksi, dan hak-hak ekonomi. Jadi, batasan sejauh mana hasil wakaf khairi boleh didistribusikan adalah sejauh kemaslahatan menghendakinya.

Konsep Kesejahteraan

Kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui sinergisitas antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* benar-benar dapat direalisasikan. Namun demikian, konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Dalam konteks ini, maka filosofi kesejahteraan sebagaimana yang dinyatakan dalam QS. Quraisy: 1-4 "Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka mereka hendaknya menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberikan makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan", merupakan salah satu konsep yang layak untuk mendapatkan perhatian. Jika merujuk pada ayat-ayat tersebut, maka konsep kesejahteraan ini memiliki empat indikator utama diantaranya yaitu:

Pertama, Sistem nilai islami. Kekuatan ekonomi di sektor riil (industri dan perdagangan), pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, serta keamanan dan ketertiban sosial. Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita menentang secara diameterial aturan Allah ta'ala. Penentangan terhadap aturan Allah menjadi penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia (QS. Thaha: 124). Kedua, kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angkatan kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.

Indikator ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi. Dengan kata lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang baik adalah sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali (QS. Al Hasyr: 7). Pada indikator keempat, kesejahteraan diukur oleh aspek keamanan dan ketertiban sosial. Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi dan konflik destruktif antar kelompok dan golongan dalam masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman (Beik, 2016).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi

kasus (*study case*). Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada salah satu implementasi program Global Wakaf Foundation yang dibawahi oleh Lembaga Kemanusiaan dan Filantropi Aksi Cepat Tanggap yaitu Lumbung Beras Wakaf di Desa Jipang, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Unit Analisis Data

Unit analisis menurut Suprayogo dan Tobroni (2001) adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen yang akan atau sedang diteliti. Unit analisis dapat berupa benda, individu, kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Analisis data pada penelitian kualitatif dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparasi, dan sejenisnya (Tatang:1991). Dengan mempertimbangkan tujuan dari penelitian ini, maka unit analisis data dalm penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat melalui filantropi Islam wakaf dengan Lumbung Beras Wakaf.

Penentuan Informan

Informan merupakan subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam peneliti. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif tidak bertujuan untuk menggeneralisasi hasil penelitiannya. Pemilihan informan pada penelitian kualitatif harus memiliki kriteria atau syarat yang berkesesuaian.

Oleh karena itu, beberapa kriteria yang perlu diperhatikan sebelum menentukan informan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 1) Informan yang mengetahui informasi mendalam tentang program pemberdayaan LBW secara konsep maupun teknis, 2) Informan yang mampu mengekspresikan tentang dampak pada bidang ekonomi setelah adanya LBW, 3) Informan yang menjadi penanggungjawab sekaligus saksi atas proses pendirian hingga pelaksanaan LBW. Maka, dalam penelitian ini dapat ditentukan beberapa informan yang sesuai kriteria yaitu dua orang informan kunci (Pak Supriadi dan Pak Lamiran), dua orang informan utama (Pak Samidin dan Bu Martini), dan satu orang informan pendukung (Pak Ngadi)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini bersumber pada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugasnya) dari sumber pertamanya (Suryabarata:1987). Sedangkan data sekunder merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi. Lalu data sekunder didapatkan menggunakan metode studi pustaka.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2009) adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman dalam Prastowo (2012) yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan serta triangulasi (sumber, teknik, dan waktu).

D. PEMBAHASAN

Pelaksanaan LBW Desa Jipang

Pada poin pelaksanaan Lumbung Beras Wakaf ini dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu dimulai dari tahap pendirian LBW Global Wakaf di Desa Jipang dan fase kedua ketika memasuki proses produksi beras LBW secara teknis mendetail di lapangan.

a) Tahap Pendirian LBW

1. Penilaian (*Assessment)*

Langkah pertama yang harus ditempuh sebelum menerapkan suatu program pemberdayaan terhadap masyarakat desa adalah dengan melakukan *assessment* atau penilaian. Hasil yang diharapkan ketika melakukan penilaian ini yaitu mendapatkan informasi dan data mengenai desa yang dijadikan sasaran dalam penerapan program pemberdayaan. Penilaian ini bisa dilakukan dengan menggunakan metode RRA (*Rapid Rural Appraisal*) dan metode PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*). Metode RRA/PRA menurut Robert Chambers (1994) dapat diartikan sebagai sekumpulan pendekatan dan metode yang mendorong masyarakat pedesaan dan atau pesisir untuk turut serta meningkatkan dan mengkaji pengetahuan mereka mengenai hidup dan keadaan mereka sendiri agar meraka dapat menyusun rencana dan tindakan pelaksanaannya.

Tujuan mendasar dari metode RRA/PRA adalah perubahan sosial. Karena perubahan yang diharapkan adalah kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan dilakukan sendiri oleh masyarakat. Sebisa mungkin masyarakat akan digerakkan dan didorong agar mampu mengenali dan menggali potensi dirinya. Sehingga mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, mengawal, serta mengevaluasi tidak lepas dari peran masyarakat itu sendiri. Hal ini menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat desa agar berani bertindak untuk memperbaiki kualitas, taraf hidup, dan martabat diri sendiri, keluarga, maupun lingkungannya. Apabila tahapan ini berhasil dilakukan, maka lebih mudah untuk mengetahui apa saja kebutuhan masyarakat desa yang akan diberdayakan. Sebab bukan pendamping program yang memutuskan suatu kebijakan pemberdayaan tetapi masyarakat-lah yang menjadi tokoh utama dalam pengambilan keputusan. Pada praktiknya, penilaian pada prorgam pemberdayaan LBW ini dilakukan dengan dua bentuk yaitu penilaian teknis dan penilaian sosial.

2. Perencanaan Bisnis (*Bussiness Plan*)

Perencanaan bisnis merupakan penelitian mengenai kegiatan organisasi (badan usaha) saat ini dan yang akan datang serta menyusun untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis sebagai wujud pedoman dalam penciptaan usaha. Perencanaan bisnis pada konteks pembangunan desa, usaha yang dikembangkan merupakan bagian dari proses mengoptimalkan penggunaan sumber daya (alam, fisik, manusia, sosial/kelembagaan dan

finansial) di wilayah pedesaan untuk mencapai tujuan–tujuan ekonomi dan sosial dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang.

Walaupun program LBW adalah bagian dari menjalankan misi kemanusiaan, tetap saja perlu dihitung secara bisnis. Karena ketika dari kacamata bisnis bisa menghasilkan profit, maka itu juga bagian dari keuntungan bagi masyarakat sekitar selaku *beneficieries* atau penerima manfaat. Logikanya, semakin banyak profit yang nanti dihasilkan, akan semakin luas juga manfaat yang bisa diberikan atau disebarkan pada umat.

3. Implementasi

Implementasi program dapat dideskripsikan sebagai suatu penerapan kebijakan, ide, inovasi, atau konsep dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan keterampilan, pengetahuan maupun sikap, dan nilai. Implementasi yang dimaksud adalah implementasi dari program pemberdayaan yakni membangun Lumbung Beras Wakaf di wilayah Desa Jipang. Tentunya pada tahapan ini akan banyak sekali pihak yang terlibat, biaya operasional yang dikeluarkan, dan waktu yang dikorbankan. Karena pendirian sampai pengelolaan LBW nanti akan bersumber dari dana wakaf, maka konsekuensinya Global Wakaf ACT harus lebih hati-hati setiap akan mengalokasikan dana tersebut harus sesuai dengan kesepakatan akad dengan para wakif.

4. *Recruitment* atau Pendataan *Beneficieries*

Pada saat Lumbung Beras Wakaf ini telah diresmikan dan sudah mengantongi izin untuk bisa segera dioperasionalkan, tentu akan membutuhkan tenaga manusia sebagai penggerak secara manajerialnya. Nah, ini akan menjadi potensi terbukanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Jipang. Selain itu, hal penting lain yang tidak boleh luput dari pendataan adalah siapa saja pihak-pihak keluarga prasejahtera di lingkungan Desa Jipang dan sekitarnya yang amat membutuhkan bantuan pangan berupa beras dari hasil produksi Lumbung Beras Wakaf ini. Sehingga hasil produksi beras dari LBW bisa didistribusikan secara merata untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga prasejahtera.

5. Monitoring Evaluasi

Tahapan akhir sebagai bentuk pendampingan pada masyarakat Desa Jipang yang masih dalam proses pemberdayaan adalah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Monitoring dilakukan dengan cara menggali informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Sedangkan evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan sangat erat dengan monitoring karena dalam evaluasi pasti akan menggunakan data yang disediakan saat kegiatan monitoring sebelumnya. Dengan melakukan evaluasi maka harapannya dapat diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian sebuah tujuan.

b) Proses Produksi LBW

Pada poin pembahasan tentang proses produksi LBW ini, untuk lebih mudah menjabarkan secara rinci maka akan dipetakan berdasarkan tiga waktu yaitu pra produksi, saat produksi, dan pasca produksi (pendistribusian). Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan berikut ini:

1) Pra Produksi

a. Proses Administratif

Karena bentuk manajemen dari Lumbung Beras Wakaf ini menggunakan sistem terpusat, maka semua birokrasi yang bersifat administratif akan dikelola langsung oleh Global Wakaf pusat. Oleh sebab itu, alur yang harus dilalui sebelum melakukan proses produksi beras adalah menyusun dan mengajukan proposal dari ACT cabang Semarang yang bekerjasama dengan MRI Kabupaten Blora selama kurang lebih satu pekan. Apabila pengajuan proposal itu telah melalui tahap pengkajian dari pusat dan hasil keputusan akhirnya diterima, maka pihak Global Wakaf pusat akan membantu untuk mencairkan dana operasional yang bisa bersumber dari dana wakaf tunai ataupun dana sedekah dari para dermawan sesuai dengan nominal yang tertera pada rancangan anggaran belanja di proposal tersebut. Proposal itu disusun sedemikian rupa dengan tujuan dan harapan agar bisa mendapat dukungan penuh dari Global Wakaf pusat dalam bentuk materiil maupun non materiil.

b. Transaksi Pembelian Gabah

Apabila dana operasional dari pusat telah berhasil dicairkan dan sampai ke tangan staf LBW yang berwenang di lapangan, maka langkah berikutnya adalah mulai melakukan transaksi jualbeli gabah dengan beberapa para petani di Desa Jipang sebagai *supplier*. Jumlah gabah yang dibeli menyesuaikan kebutuhan dan permintaan secara kumulatif dari berbagai ACT Cabang khususnya meliputi daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jakarta.

2) Saat Produksi

Menariknya, seluruh alat-alat yang digunakan untuk menunjang aktivitas produksi beras di LBW bersumber dari dana wakaf tunai yang dipercayakan para wakif kepada Global Wakaf ACT selaku nazhir. Alat-alat tersebut diantaranya, pertama mesin *dryer* atau pengering. Mesin yang dapat menghasilkan udara panas ini sangat membantu para petani agar tidak lagi merasa khawatir menjual hasil panennya saat musim penghujan tiba, karena mesin *dryer* ini tidak mengandalkan sinar matahari sebagai sumber daya panasnya melainkan dari gas LPG.

Setelah gabah dikeringkan selama kurang lebih 2x24 jam, lalu gabah akan masuk ke tahap kedua yakni mesin pecah kulit satu, pecah kulit dua, hingga pecah kulit tiga. Selanjutnya memasuki proses yang ketiga yaitu ayak, dalam tahap ini terjadi pemisahan atau pengelompokan secara otomatis antara butiran beras dan mana yang masih berupa gabah. Jika bentuknya masih gabah, maka ia akan kembali ke proses pecah kulit. Kemudian bagi yang sudah berbentuk butiran beras utuh akan masuk pada mesin poles. Proses poles ini merupakan tahapan keempat, fungsinya untuk mempercantik beras yang semula dari gabah berwarna cokelat dibersihkan hingga berubah menjadi warna putih. Lalu, masuk pada tahap kelima yakni mesin kebi tujuannya agar tampilan beras semakin tampak maksimal, bening dan mengkilat sehingga sudah siap untuk dikemas menggunakan mesin jahit ke dalam karung dengan takaran berat bersih 5 kilogram.

3) Pasca Produksi (Pendistribusian)

Setelah semua beras sudah di-*packing* sedemikian rupa memenuhi target permintaan dari beberapa Kantor ACT Cabang, maka berikutnya masuk pada tahap ekspedisi.

Pengiriman ini baru akan dilakukan dari LBW Desa Jipang Kabupaten Blora menuju berbagai daerah apabila sudah ada persetujuan atau arahan resmi dari Global Wakaf Pusat sebagai koordinator utamanya. Beras hasil produksi Lumbung Beras Wakaf ini tidak diperjualbelikan, ratusan ton beras akan dibagikan secara gratis dan cuma-cuma tanpa ada pungutan biaya sepeserpun kepada masyarakat prasejahtera dan penyintas bencana alam diberbagai daerah mulai dari dalam negeri hingga luar negeri yang membutuhkan bantuan pangan untuk bertahan hidup di lokasi pengungsian seperti Lombok, Donggala Palu, Somalia, Rohingya, Palestina, dan lainnya.

Dampak Ekonomi LBW Desa Jipang

Apabila berbicara tentang *outcome* atau dampak dari suatu program pemberdayaan masyarakat, akan sulit diketahui tanpa melakukan riset secara langsung dengan turun lapang menemui para *beneficieries* atau penerima manfaat dari *outcome* tersebut. Selain itu, para Non-Government Organization (NGO) juga sepakat bahwa suatu dampak dari program pemberdayaan itu sifatnya jangka panjang sehingga idealnya baru dapat diidentifikasi antara satu, dua, atau bahkan tiga tahun terhitung sejak program tersebut berjalan.

Dengan melihat dampak yang diharapkan dari berbagai pihak dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui LBW di Desa Jipang, beberapa dari mereka cenderung ingin mencapai kesejahteraan dibidang ekonomi. Maka peneliti bermaksud melakukan analisis dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Jipang dari tiga sudut pandang yang linier dengan kesejahteraan ekonomi yaitu penghasilan masyarakat, pola konsumsi masyarakat, dan perilaku menabung masyarakat.

1. **Penghasilan Masyarakat**

Selama kurang lebih tiga tahun Lumbung Beras Wakaf ini berproses ingin memberdayakan masyarakat perlahan hasilnya mulai terlihat. Para petani desa setempat amat bersyukur karena dengan adanya LBW mereka bisa menjual hasil panen gabahnya dengan harga terbaik diatas harga tengkulak. Terlebih saat musim penghujan, yang mungkin semula hasil penjualan gabah itu hanya cukup untuk balik modal dan menutup berbagai biaya operasional, setelah adanya LBW yang berani membeli gabah-gabah petani dengan harga tinggi akhirnya hasil dari penjualan itu juga bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup lainnya seperti biaya sekolah anak atau ditabung untuk persiapan kebutuhan masa mendatang.

Kehadiran LBW di tengah masyarakat ibarat angin segar yang telah lama dinantikan oleh para petani. Bagaimana tidak? Karena LBW membeli hasil panen gabah petani dengan harga terbaik saat panen diberbagai musim entah kemarau ataupun penghujan, tentunya di atas harga yang sebelumnya pernah ditawarkan oleh tengkulak desa setempat. Meski selisih harga gabah perkilogramnya tidak telalu jauh yakni sekitar 100 hingga 200 rupiah, namun jika dikalikan sekian ton akan tampak signifikan perbedaannya.

Namun jika dilihat dari sisi pekerja lepas harian yang sifatnya insidental, hanya dibutuhkan saat produksi beras dalam skala besar saja LBW masih belum bisa memberikan dampak yang signifikan pada buruh-buruh tersebut. Meski demikian, masyarakat Desa Jipang khususnya ibu-ibu rumah tangga juga senang dan tetap berterimakasih pada LBW. Sebab yang semula mereka hanya menganggur di rumah saja, akhirnya bisa ikut membantu suami dengan memberi tambahan penghasilan dari upah sebagai buruh kemas beras di LBW.

2. Pola Konsumsi Masyarakat

Struktur yang menunjukkan keadaan dimana pengeluran sebuah keluarga digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat disebut pola konsumsi. Dengan melihat bagaimana pola konsumsi suatu individu maupun kelompok maka kita bisa mengetahui seperti apa standar hidup mereka.

Pola konsumsi masyarakat desa tentunya akan berbeda dengan pola konsumsi masyarakat yang hidup di perkotaan. Terlebih masyarakat yang hidup di Desa Jipang, tidak jauh berbeda antara sebelum dan sesudah adanya LBW di lingkungan mereka. Penghasilan yang mereka peroleh sejauh ini hanya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan primer yang sifatnya pokok untuk bertahan hidup, meliputi sandang, pangan, dan papan. Apabila dikondisi tertentu hasil panen atau hasil ternak mereka bagus, maka mereka baru mulai memikirkan untuk mencukupi kebutuhan sekundernya dengan cara menabung sedikit demi sedikit.

3. Perilaku Menabung Masyarakat

Kesadaran menabung pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat pedesaan masih terbilang cukup rendah. Karena masih banyak masyarakat yang memiliki pola pikir bahwa alokasi keuangan untuk pos tabungan baru bisa dilakukan ketika semua kebutuhan sehari-hari sudah sepenuhnya tercukupi. Padahal, untuk membentuk kesadaran dalam berperilaku menabung tidak harus menunggu punya uang dengan nominal yang besar. *Mindset* seperti ini perlu diluruskan kembali dengan adanya peran literasi keuangan di tengah masyarakat.

Namun pada praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum siap menghadapi perubahan zaman serba digital yang menuntut untuk melek terhadap teknologi seperti layaknya kehidupan di perkotaan. Sehingga masyarakat Desa Jipang masih menggunakan sistem tabungan tradisional yaitu dengan kepemilikan aset berupa tanah ataupun hewan ternak. Sehingga bisa dikatakan sejauh ini belum terlihat perbedaan yang signifikan tentang perilaku menabung masyarakat Jipang terlebih setelah LBW mulai berdiri di lingkungan desa mereka.

E. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan beberapa narasumber serta proses penelitian dan kajian panjang tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Sektor Pertanian melalui Filantropi Islam Wakaf, maka penulis mampu menganalisis adanya keterkaitan antara hasil penelitian dengan beberapa teori yang digunakan sebagai rujukan oleh penulis dan empat macam penelitian terdahulu sebagai pembanding agar penyusunan karya ilmiah ini dapat mencapai tujuannya.

Pertama, perihal teori pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi (2010) mengenai adanya tiga kekuatan dan kemampuan masyarakat yang dikatakan berdaya. Masyarakat Jipang sebagai subjek dari program pemberdayaan LBW telah memenuhi tiga kekuatan tersebut, sehingga mereka layak dikatakan berhasil terberdayakan. Sebab, masyarakat desa jipang mampu memenuhi kebutuhan dasar sehingga bebas dari kelaparan, kebodohan, dan kesakitan. Hal ini bisa terjadi karena gabah dari hasil panen sawah mereka dibeli oleh LBW dengan harga terbaik, tentu diatas harga yang ditawarkan para tengkulak sebelumnya. Kemudian mereka juga dapat menjangkau sumber-sumber

produktif untuk meningkatkan pendapatannya, misal dengan adanya LBW di Desa Jipang masyarakat sekitar dapat mengembangkan usahanya melalui bidang peternakan. Selain sebagai tani, warga Desa Jipang juga memanfaatkan bekatul padi untuk budidaya itik atau ayam.

Kedua, tentang teori pembangunan ekonomi kawasan desa menurut Jamli (2003) bahwa sebuah desa harus mampu mengenali apa saja potensi yang dimiliki oleh wilayahnya terlebih dahulu serta memberdayakan segala bentuk sumber daya yang tersedia sebelum akan melakukan pembangunan ekonomi di suatu desa. Sehingga tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi suatu kawasan seperti membuka kesempatan kerja yang berkualitas, mencapai perekonomian yang stabil, dan membangun beragam basis ekonomi dan kesempatan kerja dapat diwujudkan. Pola serupa juga diterapkan oleh masyarakat Desa Jipang. Mereka dapat mengenali potensi desa yang berada pada sektor pertanian. Karena letak geografis Desa Jipang amat mendukung untuk melakukan panen sebanyak 3 kali dalam kurun satu tahun, jumlah lahan pertanian yang cukup luas yakni mencapai sekitar 90 hektare, dan kualitas beras yang baik dengan jenis 32 inpari.

Ketiga, berkaitan dengan teori pembangunan ekonomi dalam Islam yang mutlak dianggap wajib untuk dilakukan oleh umat muslim karena berikhtiar melakukan pemakmuran guna mencapai kesejahteraan dalam kehidupan manusia di muka bumi merupakan bagian dari ibadah. Jika belajar dari sejarah, ternyata ada kesamaan antara masyarakat Desa Jipang dan metode Rasulullah dalam melakukan pendayagunaan sumberdaya ekonomi yaitu dengan cara bercocok tanam. Sehingga bisa dikatakan bahwa bertani dan berkebun merupakan bagian dari ajaran mulia yang diwariskan oleh Rasulullah pada umatnya untuk bertahan hidup agar mampu menjaga *maqashid syariah*.

Jika dibandingkan dengan keempat penelitian terdahulu, maka hasil dari penelitian ini akan ditemukan beberapa perbedaan dan persamaan didalamnya. Perbedaan dari penelitian ini akan lebih terlihat jelas dengan dua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Azwar Anas (2016) yang berjudul "Wakaf Produktif Dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi di Yayasan Nurul Hayat Surabaya" dan penelitian yang dilakukan oleh Isnaini Qurrotu A'yuni (2018) dengan judul "Pola Kelola Wakaf dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi Wakaf Pertanian Ubi Pada Lembaga Wakaf Ansor)" yang memiliki fokus penelitian untuk menentukan bagaimana manajemen pemberdayaan ekonomi produktif dan sekedar ingin mengetahui seperti apa pola kelola wakaf produktif di suatu program pemberdayaan ekonomi pesantren.

Sedangkan persamaan penelitian ini akan lebih tampak, apabila dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahdulima Yusali (2019) yang berjudul "Model Pengelolaan Wakaf Tunai (Waqf Al-Nuqud) Sebagai Sarana Pemberdayaan Umat (Studi Kasus Pada Global Wakaf ACT Malang)" dan penelitian yang dilakukan oleh Nur Fazillah Milawati (2019) dengan judul "Pengelolaan Wakaf Uang untuk Pertanian (Studi Kasus pada Global Wakaf Cabang Yogyakarta)" yang memilih fokus penelitian dengan tujuan untuk menganalisis model pengelolaan wakaf tunai sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat serta menganalisis pengelolaan dan strategi pengembangan wakaf uang untuk pertanian. Maka, penelitian ini merupakan bentuk pengembangan dari dua penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sahdulima Yusali (2019) dan Nur Fazillah Milawati (2019) karena tujuannya ingin menganalisis bagaimana pelaksanaan program pemberdayaan yang diimplementasikan oleh Global Wakaf berupa Lumbung Beras Wakaf di Desa Jipang dan menganalisis seperti apa dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat Desa Jipang dengan keberadaan LBW di lingkungan mereka.

Selain itu, objek penelitian yang dipilih juga tedapat kesamaan yaitu sama-sama dilakukan pada Global Wakaf meskipun di lokasi cabang yang berbeda yaitu Global Wakaf ACT di Malang dan Yogyakarta. Jika ditinjau secara umum juga terdapat kesamaan pada metode pendekatan penelitian yaitu menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif pada suatu studi kasus dan menyinggung topik tentang pemberdayaan ekonomi yang bersumber dari dana wakaf tunai di sektor pertanian.

F. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pada pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa di sektor pertanian melalui filantropi islam wakaf yang berwujud Lumbung Beras Wakaf di Desa Jipang ini dapat dibagi menjadi dua fase. Fase pertama yaitu saat tahap pendirian LBW, pada fase ini harus melalui sekitar lima tahap diantaranya penilaian (*assessment)*, perencanaan bisnis (*business plan)*, implementasi, *recruitment* dan pendataan penerima manfaat (*beneficieries)*, serta monitoring dan evaluasi. Kemudian fase kedua yaitu ketika memasuki proses produksi beras di LBW dengan melihat dari sisi teknis yang mendetail dapat terbagi menjadi tiga proses meliputi pra produksi (proses administratif dan transaksi jualbeli gabah), saat produksi (mulai dari pengeringan gabah hingga pengemasan beras), dan terakhir pasca produksi (proses pengiriman atau distribusi beras kepada penerima manfaat).

2. Dampak pada bidang ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dari adanya Lumbung Beras Wakaf di Desa Jipang adalah pendapatan dan daya beli masyarakat meningkat karena hasil panen gabah dari petani dibeli oleh LBW dengan harga terbaik. Kemudian pola konsumsi masyarakat yang tetap memprioritaskan kebutuhan primer atau pokok (sandang, pangan, papan) dan biaya pendidikan anak, serta sudah terbentuknya perilaku menabung meskipun masih menggunakan sistem tradisional berupa kepemilikan aset dalam bentuk tanah atau hewan ternak seperti sapi dan kambing.

Saran

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dijabarkan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan oleh peneliti :

1. Untuk program pemberdayaan masyarakat Desa Jipang melalui Lumbung Beras Wakaf sebaiknya melakukan perluasan lahan wakaf produktif untuk dibangun gudang sebagai tempat penampungan gabah kering. Agar kapasitas atau kemampuan untuk melakukan produksi beras di LBW bisa meningkat dari sebelumnya yang hanya mampu menampung 200 ton atau setara dengan 20 ha dari 90 ha lahan pertanian yang ada di Desa Jipang. Akibatnya, hasil panen dari 70 ha lainnya tidak mempunyai pilihan selain menjual gabahnya kepada para tengkulak dengan harga jual dibawah LBW.
2. Untuk masyarakat Desa Jipang yang diberdayakan melalui program Lumbung Beras Wakaf (LBW), sebaiknya lebih ditingkatkan lagi semangatnya untuk turut berpartisipasi dalam proses pembangunan desa dengan cara mengikuti setiap program pemberdayaan yang sengaja ditawarkan karena melihat kebutuhan masyarakat entah dalam bentuk pelatihan-pelatihan atau lainnya sehingga *softskill*

maupun *hardskill* dari masyarakat Desa Jipang pun juga semakin berkembang. Agar ke depannya lebih siap menyongsong kehidupan yang sejahtera dengan potensi sektor pertanian melimpah dan sumberdaya manusia yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

Amanaturrohim, Hanifah. 2016. Pengaruh Pendapatan dan Konsumsi Rumah Tangga terhadap Kesejahteraan Keluarga Petani Penggarap Kopi di Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung. JURNAL: *Analisis Pendidikan Ekonomi, Vol. 5, No. 2*

Arif dan A. Riyadh. 2014. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa. JURNAL: *JKMP*, Vol. 2, No. 1

Badan Pusat Statistik. 2018. *Hasil Survei Pertanian Antar Sensus SUTAS 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia

Departemen Kelautan dan Perikanan. 2006. *Panduan Pengambilan Data dengan Metode Rapid Rural Appraisal (RRA) dan metode Partisipatory Rural Appraisal (PRA)*. Jakarta: PT Bina Marina Nusantara

Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia

Haq, A Faishal. 2012. Wakaf Kontemporer dari Teori ke Aplikasi.JURNAL: *MALIYAH Volume 02 Nomor 02*

Irawan, Feri. 2019. Multiplier Efek Wakaf Uang dalam Mengurangi Kemiskinan di Indonesia. JURNAL: *Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2, Nomor 1*

Irfan SB, Laily DA. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Jamaris, dkk. 2016. *Kompetensi Pendamping Pembangun Desa*. Padang: Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Kamil Sukron. 2016. *Ekonomi Islam, Kelembagaan, dan Konteks Keindonesiaan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Magya dan Isnaini, 2016. Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Pasuruan. JURNAL: *JKMP, Vol. 4, No. 2*

Moleong, Lexy L. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Prastowo, Andi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media

Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik. 2018. *Statistik Potensi Desa Kabupaten Blora 2018*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora

Sian, Revly dkk. 2017. Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kelurahan Paal Dua Kecamatan Paal Dua Kota Manado.JURNAL: *Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No. 2*

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suratha, I Ketut. 2015. Krisis Petani Berdampak pada Ketahanan Pangan di Indonesia. JURNAL: *Media Komunikasi Geografi Vol. 16 Nomor 1*

Suryabrata, Sumadi. 1987. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta:Rajawali

Syaifullah Edyson. 2016. Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Rasulullah SAW. JURNAL: *ISLAMIC BANKING Volume 2 Nomor 1*

Veriasa, Thomas Oni. 2018. *Perencanaan Bisnis Berbasis Potensi Desa: Sebuah Panduan Untuk Pemodelan Bisnis dan Penilaian Kelayakan Finansial*

Internet

Badan Pusat Statistik. 2020. *Presentase Penduduk Miskin Maret 2019 Sebesar 9,41 Persen* www.bps.go.id diakses pada 4 November 2020

Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Data Tanah Wakaf Bersertifikat di Indonesia* www.data.bwi.go.id diakses pada 8 April 2020

CNBC Indonesia. 2020. *Ancaman Krisis Pangan Tidak Main-Main, Ini Buktinya* www.cnbcindonesia.com diakses pada 4 November 2020

Databoks. 2019. *49% Rumah Tangga Miskin Menggantungkan Hidup dari Pertanian* www.databoks.katadata.co.id diakses pada 7 Mei 2020

Floderdesa. 2020. *5 Bentuk Pemberdayaan Desa yangm Revolusioner* www.folderdesa.com diakses pada 14 September 2020